SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 475/KEP.138–DINSOSPPPA/2020

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan system Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;

b. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-HakAnak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabaupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

KESATU : Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Visi Misi dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2023 sebagai berikut :

a. Visi :
   Mewujudkan Anak Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, produktif Yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang menuju Kota Layak Anak.

b. Misi :
   1. Mewujudkan hak-hak dasar anak diberbagai klaster Indikator KLA;
   2. Membuat dan mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada
   3. Pembangunan anak;
   4. Menjaga dan melindungi serta membangun sistema pelayanan terhadap
   5. korban Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran anak lainnya;
   6. Mengembangkan dan membangun fasilitas dan prasarana ramah anak;
   7. Mendukung dan mengembangkan Forum Anak ikut berpartisipasi aktif dalam Pembangunan;
   8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan dan pengembangan Kota Layak Anak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarakat dan lainnya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 475/KEP.138–DINSOSPPPA/2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

RENCANA AKSI DAERAH

Pengembangan KLA Kabupaten Sumedang.

NO	U R A I A N	INDIKATOR	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	I.KELEMBAGAAN			
	1. Persentase Anggaran Untuk pemenuhan Hak Anak	Adanya keputusan Bupati tentang gugus tugas KLA diantaranya : - Perda Kibla - Perda tentang - Kependudukan - Perda Kabupaten Layak Anak - Perda Kartu Identitas Anak - Perda Kartu Identitas Anak - Perda Penyelenggaraan Pendidikan	-Bagian Hukum -Sekda -Bupati	- Bappppeda - Dinas Sosial P3a - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Disdukcapil
	2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kebijakan program Dan kegiatan forum Anak	- Surat Keputusan Bupati tentang Forum Anak Sumedang Tandang - Surat Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan.	Bagian Hukum Camat	- Dinas Sosial P3A - Dinas Pendidikan
	3. Ketertiban Lembaga Masyarakat Dunia Usaha, media dalam pemenuhan hak anak	- Adanya lembaga layanan untuk anak - Adanya CSR dalam kegiatan kegiatan pemenuhan Hak Anak.	- LSMPedulinak - SemuaPerusahaan di Kab Sumedang - Semua media baik Elektronik maupun media cetak d kab sumedang.	- Dinas Sosial P3A - Dinas Pendidikan
II	KLASTER I			

	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
	1. Persentase anak tang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	- Pengurusan akta kelahiran sesuai standar mutu - Pengurusan akta lahir gratis - Semua anak memiliki akta kelahiran - Jumlah dokumen kependudukan yang sampai ke pemohon - Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	Semua penduduk Kabupaten Sumedang	- Dinas kependudukan - Dinas Kesehatan - Camat - Lurah
	2. Tersedia fasilitas informasi layak anak	- Adanya kebijakan tentang internet sehat - Terdapatnya taman bacaan untuk setiap anak - Adanya perpustakaan keliling - Adanya titik LAn Wifi gratis - Pelatihan SDM di bidang persandian dan informasi - Pengawasan dan pengendalian BTS	Masyarakat di Kabupaten Sumedang	- Dinas Kominfo - Dinas Arsip dan Perpustakaan - Bagian Hukum
	3. Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	- Terbentuknya Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan - Remaja yang mendapat informasi KRR - Jumlah remaja yang mendapat pelatihan life skil melalui pokjayan genre	Seluruh anak di Kab Sumedang	Dinas Sosial P3A

III	KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
	1. Persentase usia perkawinan	- Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini. - Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan di bawah umur - Pendewasaan usia perkawinan	Anak di bawah umur	- Kemenag - DinsosP3A - Dinas Pengendalian - Penduduk dan KB
	2. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga	- Tersedianya Lembaga Konsultasi Keluarga - Pembinaan Kader Posyandu	- LSM - Lembaga Pemerhati Anak	- Dinsos P3A - Dinas Kesehatan - Bagian Kesra - TP.PKK - LK3
	3. Tersedianya lembaga pengasuhan alternative	- Adanya Lembaga pengasuhan alternative (LK3, P2TP2A, LKSA) terjaminnya hak asuh anak - Pembinaan Kader Posyandu	- Tenaga kependidikan - Kader Posyandu - Anak dalam panti dan luar panti	- Dinas Sosial P3A - Tp.PKK - Bagian Kesra - Dinas pendidikan - Himpaudi - Kecamatan dan desa
	4. Ketahanan Keluarga	Cakupan BKB aktif yang dibina Cakupan BKR aktif yang dibina Cakupan BKL aktif yang dibina Jumlah RR siduga yang terlatih	- Kader Posyandu - Bayi, Balita dan Remaja	- Kecamatan dan Desa - Dinas PPKB
	5. Tersedianya Pendidikan Usia Dini yang holistik integrative	- Adanya program pendidikan usia dini - Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan - meningkatnya sarana prasarana pendidikan.	Masyarakat (Anak) di Kabupaten Sumedang	- Dinas pendidikan - Himpaudi

	6. Adanya Infrastruktur Ramah Anak	- Adanya zona selamat sekolah - Tersedianya sarana dan prasarana/infrastur ramah anak - Adanya tempat beriman anak - Jumlah rambu-rambu dan fasilitas lalulintas pada ruas jalan - Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Infrastruktur di kabupaten sumedang	- Pol PP - Dishub - PU dan penataan ruang - Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan
	7. Pengelolaan ruang terbuka hijau	- Persentase Tuang terbuka Hijau yang terkelola - Peningkatan fungsi serapan air ruang terbuka hijau - Jumlah sekolah berbudaya lingkungan	Taman kota dan ruang terbuka hijau	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - PU dan penataan ruang
III	KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
	1. Pelayanan Kesehatan terstandar bagi bayi baru lahir, balita dan anak pra sekolah	- Persentase pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir - Persentase layanan kesehatan anak balita	Semua bayi, balita, dan ibu hamil	- Dinas Kesehatan - Puskesmas - Bidan Desa - TP.PKK
	2. Angka Kematian bayi (AKB)	- Semua Ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari Nakes dan difasilitasi Kesehatan	Semua bayi, balita, dan ibu hamil	- Dinas Kesehatan - RSUD - Puskesmas
	3. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	- Semua posyandu memberi layanan pada bayi balita dan ibu hamil - Semua ibu yang melahirkan	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan - TP.PKK - Kader Posyandu

		- Pelayanan gizi terstandar		
	4. Persentase Asi Eksklufis	- Melakukan IMD dan memberi Asi Ekslkusif pada bayinya - Tersedianya puskesmas ramah anak	Keluarga yang memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan - TP.PKK - Seluruh SOPD - Dunia Usaha
	5. Percepatan Perbaikan gizi untuk penanggulangan stunting	Keluarga balita stunting mendapatkan pendampingan Puskesmas melakukan surveilan gizi aktif	Bayi dan balita Stunting	- Dinas Kesehatan - TP.PKK - Seluruh SKPD
	6. Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Persentase anemia pada ibu hamil Persentase BBLR Persentase balita Gizi Persentase balita kurus	Keluarga yang memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan - TP.PKK - Kader Posyandu
	7. Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang terakteditasi Persentase tenaga kesehatan yang terakreditasi	Masyarakat di kabupaten sumedang	- Dinas Kesehatan - TP.PKK - Puskesmas
	8. Pengawasan hygiene dan sanitasi lengkap tempat tempat umum	Persentase tempat umum sehat	Ruang Publik	- Dinas Kesehatan - RSUD - Puskesmas
	9. Imunisasi dasar lengkap	Persentase anak usia 0-11 yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Keluarga yang memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan - RSUD - Puskesmas
	10. Rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak	Pembangunan sarana prasarana air bersih Penyediaan sanitasi dan air munum berbasis masyarakat	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinas Kesehatan - PDAM - Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan dan Pemukiman
	11. Jumlah Pojok ASI	- Tersedianya sarana yang nyaman bagi ibu yang sedang menyusui	Ibu Menyusui	- Dinas Kesehatan - RSUD - Dinas Sosial P3A

	12. Tersedianya kawasan tanpa rokok	- Tersedianya tempat khusus rokok Disemua lingkungan lembaga pendidikan, Rumah Sakit dan balai pengobatan dan fasilitas publik		- Dinas Kesehatan - Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan dan Pemukiman - PDAM - Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Sat.Pol.PP - Dinas Pendidikan - Dinas Perhubungan
III	KLASTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA			
	1. Angka partisifasi pendidikan anak usia dini	- Semua kelurahan memiliki PAUD - Adanya fasilitas Play Ground untuk anak usia dini - Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu	Anak di bawah 6 tahun	- Dinas Pendidikan - TP.PKK - HIMPAUDI
	2. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Anak-anak usia pendidikan mendapatkan haknya untuk bersekolah	Anak usia sekolah	- Dinas Pendidikan - Kemenag
	3. Persentase Sekolah Ramah Anak	Anak merasa aman di sekolah, bebas dari kekerasa eksploitasi dan pelecehan semua sekolah termasuk sekolah ramah anak	- Semua guru - Semua sekolah - Semua peserta didik	- Dinas pendidikan - Kemenag - Kecamatan - Dinsos P3A
	4. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	- Tersedianya fasilitas bermain untuk anak - Anak anak nyaman dan aman dalam bermain dan berekreasi	- Semua anak yang melakukan - Kegiatan Kreatif dan rekreatif	- Disbudparpora - Dinas PU - Dinas pendidikan - Lingkungan Hidup - Kecamatan

		- Pembinaan Kesenian dan kebudayaan Daerah		
IV	KLASTER V HAK PERLINDUNGAN KHUSUS			
	1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan (anak disabilitas, ABH, terorisme, stigma, pornografi dan dalam situasi darurat)	- Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan, anak disabilitas ABH, theirisme, stigma, pornografi dan dalam situasi darurat. - Bimbingan teknis wawasan kebangsaan dan bela Negara - Pencegahan dini potensi kerawanan politik ekonomi sosial dan sara	Masyarakat SKPD Keluarahan/Desa	- Kesbangpol - Kominfo - Bappppeda - Forum Anak - DinsosP3A - LK3 - Pol PP - P2TP2A - BPBD
	2. Persentasi kasus anak berhadapan dengan hukum	- ABH yang dapat difasilitasi, lembaga/instansi terkait ABH	Masyarakat dan anak	- P2TP2A - Penegak Hukum - Polres - Pengadilan Negeri - Kejaksaan - DinsosP3A
	3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	- Adanya rumusan penanganan bencana - Konseling dan pemulihan anak pasca bencana - Adanya Pembinaan Linmas - Pembinaan statistic penanggulangan bencana	Masyarakat dan anak	- BPBD - Dinas Sosial P3A

		- Pencegahan dini dan penanggulangan bencana - Rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi wilayah bencana		
	4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	- Tidak adanya pekerjaan terburuk anak - Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan ketenagakerjaan	Masyarakat dan anak	- Disnaker - Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001